

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara realitas, potret perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia baik dari tingkat SD, SMP, sampai pada SMA bahkan perguruan tinggi mengalami tantangan serta kondisi yang sangat memprihatinkan. Berbagai masalah yang timbul yakni semakin tingginya biaya pendidikan, serta ketidak merataan dalam pembangunan baik berupa sarana dan prasarana sekolah telah memperhadapkan masyarakat sulit mengakses pembelajaran. Lebih dari itu yang terparah masih banyaknya anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan kewajibannya bukan hanya di perkotaan terlebih utama di tingkat pedesaan. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalanya biaya pendidikan.

Salah satu program di bidang pendidikan yang diberikan pemerintah untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS meskipun ditujukan terutama dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan, diharapkan dapat pula mendukung peningkatan mutu, relevansi, dan daya

saing, serta peningkatan tata kelola dan pencitraan pendidikan yang positif di hadapan publik dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajib dikdas 9 tahun). Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang heterogen.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan untuk biaya satuan pendidikan (BSP) yang sifatnya operasional dalam menunjang proses belajar mengajar agar mencapai standar pelayanan minimal. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sedangkan, dana BOS buku dimaksudkan meningkatkan ketersediaan buku pelajaran di tingkat dasar.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagaimana kita ketahui bersama pelaksanaan penuntasannya tertunda. Semula ditargetkan tahun 2005 sudah tuntas melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, namun sampai sekarang belum tuntas. Ukuran ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah apabila Angka Partisipasi Kasar (APK) mengikuti sekolah dasar (SD), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang sederajat, karena peserta didik dihitung semuanya, meskipun ada peserta didik yang usianya lebih dari itu.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2009 dikelola secara bersama-sama (*joint management*) oleh Departemen Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan BOS dan BOS Buku ditujukan pada sasaran pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, Biaya satuan BOS yang diberikan kepada setiap peserta didik, yaitu Rp. 400.000 per tahun untuk peserta didik SD di kota dan Rp. 397.000 per tahun untuk tingkat SD di kabupaten, sedangkan Rp. 575.000 per tahun untuk SMP di kota dan Rp. 570.000 per tahun untuk SMP di kabupaten. Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme per triwulan.

Mekanisme dana BOS dan BOS buku disalurkan langsung ke rekening SD dan SMP, setelah melalui sejumlah mekanisme penyaluran. Sedangkan, indikator keberhasilan penyelenggaraan BOS dan BOS buku diukur melalui sejumlah indikator seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penggunaan.

Kondisi masyarakat untuk menyekolahkan bukan hanya sekedar tersedianya ruang belajarnya saja, tidak cukup sampai disitu, tetapi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi diantaranya berkaitan dengan pembiayaan. Pada masa-masa lalu di beberapa sekolah untuk mengikuti pendidikan dikenakan biaya yang disebut dengan sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP, meskipun namanya sumbangan tetapi sifatnya wajib. Untuk membantu supaya mereka tidak perlu membayar SPP, maka BOS diharapkan bisa membantu sekolah untuk menutupi anggaran belajar sekolah tersebut. Itulah sebabnya BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah atau madrasah. Menghitungnya seperti itu karena pemerintah dalam menganggarkan pendidikan ada *cost* yang disebut *fix cost* yaitu

bantuan yang khusus untuk dihitung berdasarkan sekolah semuanya sama, tetapi ini diperuntukan bagi sekolah negeri. Sedangkan *variable cost* dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, tidak dibedakan antara negeri maupun swasta supaya semua orang diharapkan bisa sekolah. Ini sebetulnya baru konsep yang hanya menyediakan pelayanan pendidikan secara minimum sekali, artinya yang penting mereka statusnya bersekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk uang maupun buku adalah bantuan supaya peserta didik bisa sekolah atau secara minimum bisa mengenyam pendidikan yang targetnya adalah supaya minimal pendidikan yang wajib bisa diikuti oleh sebagian besar atau minimal 95% dari semua anak usia sekolah. Oleh karena itu perlu manajemen yang cermat, terutama yang dilakukan oleh para pengelolanya. Secara klasik inti manajemen ada empat, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Bagaimana merencanakan dana dengan pendistribusiannya bisa dilakukan secara baik, siapa yang melakukannya dan apa yang dilakukannya, bagaimana mengaktualisasikan, melaksanakan, mengimplementasikannya. Kemudian bagaimana juga mengontrol/mengawasinya, sehingga tidak terjadi ada manajer-manajer swasta yaitu orang yang pura-pura menghimpun diri pura-pura mengkoordinasi kemudian ikut serta mendistribusikannya. Penyimpangan seperti ini yang harus dicegah dan itu menjadi bagian dari kegiatan *controlling* yang harus dikendalikan agar jangan sampai terjadi. Karena pada hakekatnya bantuan itu merupakan hak peserta didik yang diberikan kepada sekolah. Artinya sekolah diberi amanah untuk bisa menerima dana ini untuk kepentingan peserta didik. Begitu juga

sebagai pengelola diberi amanah untuk bisa supaya bantuan itu sampai ke sekolah yang akan menerimanya.

Jika dewan guru, komite sekolah dan staf sekolah pada SMP Negeri 3 Karamat Kabupaten Buol telah memiliki komitmen pada peningkatan pengelolaan BOS, sehingga kepala sekolah dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi produktivitas, dan kualitas pelayanan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus membutuhkan proses penyesuaian-penyempurnaan terlebih utama dukungan dari dinas pendidikan dan pemerintah Kabupaten Buol.

Jadi manajemen yang baik itu semuanya bisa terkendalinya akses-akses negatif dari pelaksanaan atau penyaluran BOS baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk buku sehingga bisa terealisasi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang sudah tertulis. Sasaran akhirnya adalah peserta didik bisa memperoleh pendidikan minimum. Kalau untuk pendidikan yang baik harus mengeluarkan biaya ekstra, maka bantuan yang diberikan pemerintah sekecil apapun harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena pendidikan adalah kunci keberhasilan dan kesejahteraan hidup seseorang.

Sehingganya bertolak dari masalah ini, peneliti merumuskan formulasi judul ***“Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 3 Karamat Kab.Buol Provinsi Sulawesi Tengah”*** sebagai upaya mengetahui, menganalisis, dan menjawab permasalahan sesuai dengan target yang diharapkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini berupa : Belum adanya tindakan kongkrit dari Dinas Pendidikan terhadap masalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah; Terbatasnya pengetahuan pegawai pengelola tentang penerapan fungsi manajemen pada SMP Negeri 3 Karamat; Lemahnya manajemen pihak sekolah SMP Negeri 3 Karamat terhadap berbagai hambatan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan inti dalam suatu penelitian sebagai berikut :

1. 8Bagaimanakah Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 3 Karamat Kab. Buol ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hambatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 3 Karamat Kab. Buol ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Sekolah SMP Negeri 3 Karamat untuk mengatasi hambatan Penyaluran Bantuan Operasional ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Karamat Kabupaten Buol.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 3 Karamat Kab. Buol.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sekolah SMP Negeri 3 Karamat untuk mengatasi hambatan penyaluran bantuan operasional.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu :
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan pengetahuan dalam hal pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS).
 - b. Sebagai dasar teori bagi pengembangan penelitian yang relevan lebih lanjut.
2. Manfaat praktis yaitu:
 - a. Bagi peneliti, Diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah agar dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan.
 - b. Sebagai masukan bagi kepala sekolah SMP Negeri 3 Karamat terlebih Pemerintah Kabupaten Buol dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah terkait dengan melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya.